

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA

Oleh:

Yanyan Mochamad Yani

Di penghujung tahun 2008 ini salah satu aspek yang perlu untuk dikaji yakni mengenai politik luar negeri Indonesia. Paling tidak, pemahaman akan kinerja implementasi kebijakan luar negeri Indonesia akan dapat mengarahkan kita pada bagaimana proyeksi tingkah laku Indonesia di lingkup masyarakat internasional ke depan serta implikasi kebijakan apa yang kiranya perlu dimuskan oleh para pemangku kepentingan nasional di tanah air tercinta ini.

Kita mafhum bahwa dewasa ini Indonesia sebagai sebuah entitas negara-bangsa sedang memasuki suatu era yang ditandai oleh saling ketergantungan (interdependensi) antar-bangsa yang semakin mendalam, saling keterkaitan antar-masalah yang semakin erat, serta proses globalisasi, khususnya dalam perekonomian dunia yang semakin menyeluruh, dipacu oleh kemajuan-kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi. Sebagai akibatnya, dunia terasa semakin menciut, batas-batas antar negara semakin kabur dan kaidah-kaidah seperti kedaulatan negara dan integritas teritorial semakin terkikis maknanya.

Lebih lanjut, dari perspektif tatanan politik dunia kontemporer Indonesia juga sedang berada dalam arus empat kecenderungan mendasar. Pertama, menguatnya gejala saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar-masalah global di berbagai bidang. Seiring dengan itu, semakin menguatnya arus serta dampak globalisasi dengan segala implikasinya, baik yang positif maupun yang negatif. Kedua, meningkatnya peranan aktor-aktor non-pemerintah dalam tata-hubungan antar negara. Ketiga, menguatnya isu-isu baru dalam agenda internasional, seperti a.l. masalah hak asasi manusia, intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, “*good governance*”, lingkungan hidup, dan lain-lain.

Setiap bangsa, negara dan lembaga internasional, termasuk Indonesia tanpa kecuali, harus menyesuaikan diri pada konstelasi global yang telah berubah dan yang sedang terus berubah sedemikian drastisnya itu. Tak terelakkan, perubahan-perubahann tersebut memunculkan aneka ragam tantangan dan sekaligus peluang baru bagi Indonesia di masa mendatang.

Pada tataran praksis, politik luar negeri suatu negara sesungguhnya merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari politik dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi regional maupun internasional. Demikian pula halnya dengan politik luar negeri Indonesia yang tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor, antara lain posisi geografis yang strategis, yaitu posisi silang antara dua benua dan dua samudra; potensi sumber daya alam dan manusia

berikut susunan demografi; dan sistem sosial-politik yang sangat mempengaruhi sikap, cara pandang serta cara Indonesia memposisikan diri di fora internasional.

Secara demikian, kiranya tidak berlebihan apabila seyogyanya pelaksanaan politik luar negeri pun dengan sendirinya diarahkan pada prioritas mengupayakan dan mengamankan serta meningkatkan kerja sama dan dukungan negara-negara sahabat serta badan-badan internasional bagi percepatan pemulihan perekonomian nasional dan sekaligus mengupayakan pulihnya kepercayaan internasional terhadap tawar dan kemampuan pemerintah Indonesia untuk mengatasi krisis multidimensional yang sedang Indonesia hadapi saat ini.

Pada titik ini, kini timbul pertanyaan, di era “Indonesia baru” langkah apa yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan nasional berkenaan dengan peningkatan kinerja implementasi kebijakan luar negeri Indonesia?.

Negara yang memiliki keunggulan diplomasi akan memperoleh banyak manfaat baik bagi kemajuan pembangunan dan menjaga integritas negerinya, maupun untuk memperkuat posisi tawar dalam rangka hubungan internasionalnya. Oleh karena itu, meningkatkan keunggulan diplomasi merupakan kebijakan yang harus dilakukan setiap negara. Begitu pula dengan Indonesia, di dalam menghadapi era global ini Indonesia harus mengupayakan peningkatan kemampuan diplomasinya, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan dunia internasional. Kepercayaan dunia internasional memiliki kaitan erat dengan program-program pencapaian kepentingan nasional, dengan kepercayaan tersebut akan memudahkan Indonesia dalam pencapaian tujuan nasional baik jangka pendek maupun pencapaian tujuan jangka panjang.

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan keunggulan diplomasi yang sudah ada, sehingga mampu mewujudkan integritas bangsa dalam rangka kepentingan nasional?

Pemberdayaan Publik dalam Masalah Luar Negeri

Globalisasi dan revolusi informasi telah mengubah kenyataan wawasan dalam hubungan internasional, dan telah mendorong pergeseran paradigma, dari paradigma *traditional diplomacy* yang dilakukan para diplomat dan di waktu sebelum revolusi informasi masih dianggap sebagai satu-satunya aktor utama dalam menangani masalah luar negeri serta hubungan internasional, kepada paradigma baru yang menempatkan peran aktor publik di luar pemerintahan atau disebut *non-state actors* dalam internasional dan diplomasi semakin menonjol.

Diplomasi yang dilakukan aktor non-pemerintah kepada masyarakat bangsa atau dari pemerintah kepada masyarakat bangsa lain disebut diplomasi publik. Secara umum diplomasi

publik merupakan langkah-langkah mempromosikan kepentingan nasional Indonesia dalam rangka menciptakan saling pengertian dan mempengaruhi opini masyarakat luas di luar negeri. Dengan kata lain peran aktor non-pemerintah ini telah menjadikan kebijakan yang berlaku secara internasional tidak boleh ada jarak dengan kebijakan yang berlaku secara nasional.

Hal itu perlu secara sungguh-sungguh diresapi oleh setiap insan Indonesia. Jangan sampai bangsa ini terjebak ke dalam masalah yang sama. Yang diakibatkan dari tidak konsistennya antara kebijakan di tingkat nasional dengan kondisi lingkungan strategis internasional yang sedang berlangsung. Misalnya, pada saat sebelum Indonesia menghadapi krisis moneter tahun 1997, dalam lingkup internasional telah terjadi liberalisasi di bidang ekonomi. Indonesia juga melakukan liberalisasi tetapi setengah hati. Tidak didukung oleh sistem hukum yang cukup, oleh birokrasi yang anti korupsi dan oleh pengusaha yang memiliki jiwa *entrepreneurship*, sehingga jarak kebijakan antara dalam negeri dengan internasional begitu jauh, dan dengan sedikit gangguan pada bidang ekonomi di lingkup internasional maka ekonomi Indonesia *collapse*.

Contoh lain, seperti sejak akhir Perang Dunia II, perjuangan internasional diarahkan kepada pemenuhan hak asasi manusia dan kepada terciptanya tatanan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Tetapi di Indonesia di dalam pembangunan politiknya dikekang yang mengakibatkan tatanan kenegaraan menjadi lumpuh. Contoh kasus, apabila terjadi pelanggaran HAM di Indonesia, para diplomat tidak dapat menutup-nutupi lagi pelanggaran HAM tersebut karena bangsa lain akan cepat mengetahui melalui teknologi informasi. Maka itu diplomasi harus dapat mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan di luar kepada publik dalam negeri, dan mengkomunikasikan perkembangan-perkembangan di dalam negeri ke luar negeri.

Proyeksi ke Depan: Penguatan Diplomasi HAM

Selaras dengan pemahaman di atas, tampilnya Partai Demokrat ke tampuk kekuasaan di Amerika Serikat (AS) kiranya dalam beberapa tahun ke depan akan makin menguatkan upaya pemberdayaan publik dalam masalah luar negeri berkenaan dengan diplomasi hak asasi manusia. AS di bawah kepemimpinan Partai Demokrat tak pelak lagi tampaknya akan mendominasi corak hubungan internasionalnya bertumpu pada pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. Dengan kata lain, di dalam menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain termasuk Indonesia, AS kerap akan mengkaitkan kebijakannya dengan tingkat pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi di negara tersebut. Sudah siapkah kita menghadapi karakter sistem internasional seperti demikian?. Apa posisi tawar (*bargaining position*) yang Indonesia miliki?.

Dalam konteks ini, dimensi intermestik diplomasi HAM Indonesia mutlak dilakukan. Peningkatan peran aktif Indonesia dalam diplomasi HAM pada tataran internasional yang disinergikan dengan berbagai langkah pembaruan, sosialisasi informasi dan reformasi di bidang pemajuan HAM dan demokratisasi perlu terus diupayakan.

Dewasa ini, dalam diplomasi HAM Indonesia sudah beberapa langkah lebih maju dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Misalnya, secara bertahap dan berkesinambungan telah dibentuk berbagai lembaga negara, badan pemerintah ataupun lembaga independen yang secara langsung akan memperkuat sistem kenegaraan dan kemasyarakatan yang lebih menjamin perlindungan HAM, penguatan *rule of law* dan pemajuan kehidupan demokrasi. Termasuk dalam kategori ini adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komisi Hukum Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian dan seterusnya.

Pada tataran internasional, Indonesia juga telah menjadi Negara Pihak enam dari tujuh Kovenan Utama PBB. Keenam Konvensi HAM utama tersebut adalah Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak Ekososbud (ICESCR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD). Saat ini Indonesia sedang dalam proses ratifikasi konvensi ketujuh yaitu Konvensi Pekerja Migran (CMW). Hal tersebut telah semakin menunjukkan keseriusan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dalam menghadapi era makin menguatnya diplomasi HAM dalam hubungan internasional untuk beberapa tahun ke depan (*immediate years*).

Menyimak keseluruhan paparan di atas, tepatlah kiranya apabila kita berpijak kepada pemahaman bahwa upaya pemajuan kinerja politik luar negeri Indonesia harus berawal dari “rumah” kita sendiri. Bangsa ini adalah bangsa yang besar. Sudah selayaknya apabila setiap insan di bumi pertiwi ini bahu membahu bersinergi untuk dapat berdiri tegak, bermartabat, diperhitungkan dan dihormati dalam kancah hubungan internasional. Semoga.***

=====
**Penulis adalah Dosen Jurusan Hubungan Internasional dan Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.**